

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA - SAMA
(Studi Putusan Nomor: 560/Pid.B/2024/PN Llg)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Hukum



Disusun oleh:

RUMADI

21120003

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
JAKARTA
2025**

Juridical Analysis of the Crime of Premeditated Murder Committed Jointly

(Case Study of Decision Number: 560/Pid.B/2024/PN Llg)

THESIS

Submitted For Bachelor's Degree of law at Satya Negara Indonesia

University



SATYA NEGARA INDONESIA UNIVERSITY

Faculty of Social And Political Science

Derpartment of Law

Class of 2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah ini adalah hasil karya saya sendiri dan sumber-sumber baik yang dikutip maupun di rujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Dengan demikian saya menyatakan bahwa tugas akhir ini di bebas dari unsur-plagiasi dan apabila dokumen ini di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah di peroleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi lain.

Jakarta, 9 April 2025

Yang membuat pernyataan

Rumadi

2200003

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA

TANDA PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

NAMA : RUMADI

NIM : 211200003

JUDUL : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA

PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DI

LAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA

Studi Putusan Nomor: 560/Pid.B/2024/PN.Llg

PROGRAM STUDI : HUKUM

PEMINATAN : PIDANA

Jakarta, 15 Agustus 2025

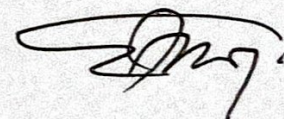
Pembimbing I

Menyetujui

Pembimbing II



Retno untari S.H., M.H.

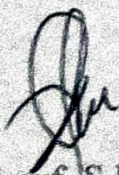


Dr. Ernawati S.H., M.H.

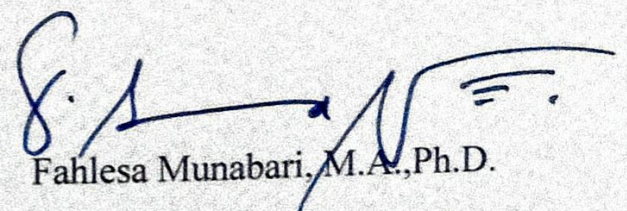
Ketua Program Studi

Mengetahui

Dekan FISIP



Burhanudin Yusuf, S.H., M.H.C. Med.



Fahlesa Munabari, M.A., Ph.D.

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA

NAMA : RUMADI
NIM : 211200003
JUDUL : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DI
LAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA
Studi Putusan 560/Pid,B/2024/PN.Llg

PROGRAM STUDI : HUKUM

PEMINATAN : PIDANA

Jakarta, 15, Agustus, 2025

Menyetujui

Ketua Penguji : Retno Untari, S.H.,M.H

(.....)

Penguji I : Burhanudin Yusuf, S.H.,M.H. C.Med

(.....)

Penguji II : Dr.Ernawati, S.H.I.,M.H

(.....)

Mengetahui

Kepala Program Studi

Burhanudin Yusuf, S.H., M.H. C.Med

Dekan FISIP

Fahlesa Munabari, M.A.,Ph. D

ABSTRAK

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan bentuk kejahatan serius karena mengandung unsur kesengajaan dan perencanaan sebelumnya dalam menghilangkan nyawa orang lain. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, perbuatan ini diatur dalam Pasal 340 KUHP. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya dugaan kekeliruan dalam penerapan pasal tersebut dalam Putusan Nomor 560/Pid.B/2024/PN Llg, di mana terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 340 KUHP meskipun fakta persidangan menunjukkan bahwa tindakan pembunuhan dilakukan secara spontan dan emosional, tanpa perencanaan matang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kebenaran alat bukti yang diajukan di persidangan serta mengevaluasi pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan. Sumber data berasal dari bahan hukum primer berupa salinan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder seperti literatur hukum pidana dan teori pembuktian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur "dengan rencana terlebih dahulu" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang ada, seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan *visum et repertum*. Tindakan pembunuhan dilakukan secara spontan akibat konflik emosional yang dipicu oleh pertengkaran fisik dan konsumsi alkohol. Oleh karena itu, penerapan Pasal 340 KUHP dinilai tidak tepat dan seharusnya lebih relevan jika diterapkan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa. Kesimpulannya, hakim seharusnya lebih cermat dalam menilai unsur perencanaan dan mempertimbangkan asas *in dubio pro reo* dalam memutus perkara pidana yang menyangkut nyawa seseorang, agar prinsip keadilan dan kepastian hukum tetap terjaga.

Kata Kunci: Pembunuhan berencana, pembuktian, Pasal 340 KUHP, keadilan, pertimbangan hakim.

ABSTRACT

Premeditated murder is considered a serious criminal offense as it involves deliberate intent and prior planning to take another person's life. Under the Indonesian Criminal Code (KUHP), this crime is regulated in Article 340. This research is motivated by the suspected misapplication of this article in Decision Number 560/Pid.B/2024/PN Llg, in which the defendant was convicted under Article 340 despite evidence indicating that the killing was committed spontaneously and emotionally, without a well-planned scheme. The purpose of this research is to analyze the validity of the evidence presented at trial and evaluate the judge's legal considerations in rendering the verdict. This research uses a normative juridical method with a case study approach to court decisions. Data sources include primary legal materials in the form of court rulings and secondary legal materials such as criminal law literature and theories of legal proof. The results show that the element of "premeditation" was not proven legally and convincingly based on the available evidence, including witness testimonies, the defendant's statement, and the post-mortem report. The murder occurred spontaneously due to emotional conflict triggered by a physical altercation and alcohol consumption. Therefore, the application of Article 340 KUHP was deemed inappropriate and Article 338 KUHP on ordinary murder should have been more relevant. In conclusion, judges must be more thorough in assessing the element of premeditation and apply the principle of in dubio pro reo when adjudicating criminal cases involving human life, to uphold the principles of justice and legal certainty.

Keywords: *Premeditated murder, evidence, Article 340 KUHP, justice, judicial consideration.*